
Bab 13 Pembangunan Industri

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan:

1. Peranan sektor industri dalam pembangunan
2. Perhatian terhadap pembangunan industri
3. Keterkaitan antar-industri (*industrial linkages*)
4. Pembangunan industri di Indonesia

PERANAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Konsep pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi, oleh karena seringkali pengertiannya dianggap “sama”. Negara maju yang pertama kali adalah Inggris. Revolusi Industri, seringkali inovasi yang menghemat biaya lewat mesin uap, memungkinkan Inggris untuk meningkatkan produksinya sebesar 400 persen selama paruh pertama abad ke - 19. Sejak itu sampai sekarang ini kriteria utama dari pembangunan adalah kenaikan pendapatan per kapita yang sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi. Dua negara yang paling sukses pembangunannya pada awal abad ke 20, Jepang dan Uni Sovyet, juga disebabkan oleh adanya industrialisasi di negaranya masing-masing.

Proses industrialisasi dan pembangunan industri ini sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain, pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja.

Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumberdaya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara “vertikal” semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara “horizontal” semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah.

Kita telah sering mendengar pendapat bahwa industri itu mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). *Leading sector* ini maksudnya adalah dengan adanya

pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa, misalnya. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Seperti diungkapkan di muka, berarti keadaan menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya belinya). Kenaikan pendapatan dan peningkatan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat.

Dari uraian di atas bisa ditelaah peranan industri dalam perkembangan struktural pada suatu perekonomian. Tolok ukurnya yang terpenting antara lain: subangan sektor industri (manufacturing) terhadap PDB, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa.

Sumbangan kegiatan industri terhadap PDB di Indonesia sudah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970 sektor industri menyumbang 8,4 persen terhadap PDB, dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 15,3 persen, dan pada tahun 1985 diperkirakan lebih sedikit dari itu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Pelita I Indonesia masih termasuk kategori negara non-industri (non-industrial country), maka pada Pelita V ini telah masuk dalam kategori negara yang berada dalam proses industrialisasi (industrializing country).

Menurut kriteria UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) negara-negara dikelompokkan sebagai berikut:

- a. kelompok *negara non-industri* (non-industrial country) apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB kurang dari 10 persen.
- b. kelompok *negara dalam proses industrialisasi* (industrializing country) apabila sumbangan tersebut antara 10-20 persen.
- c. kelompok *negara semi industri* (semi industrialized country) jika sumbangan tersebut antara 20-30 persen, dan
- d. kelompok *negara industri* (industrial country) jika sumbangan tersebut lebih dari 30 persen.

Peranan industri ditinjau dari aspek kesempatan kerja dapat dilihat dari bagian persentase angkatan kerja yang dalam sektor industri. Untuk Indonesia, pada tahun 1970 persentase tersebut antara 8-8,5 persen, pada tahun 1980 naik sedikit menjadi 9,1 persen, sedangkan pada tahun 1990 diperkirakan sebesar 10 persen. Jadi secara kuantitatif sektor industri masih belum begitu berarti sebagai lapangan kerja dan sumber mata pencaharian dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Tingkat kenaikan kesempatan kerja secara keseluruhan dalam perekonomian Indonesia selama dasa warsa 1970-an sebesar rata-rata 3 persen per tahun. Tingkat itu jauh berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang sebesar rata-rata 7,8 persen per tahun pada kurun waktu yang sama. Khususnya di sektor industri, selama kurun waktu tersebut, tingkat

kenaikan kesempatan kerja adalah sebesar rata-rata 6,2 persen per tahun, dibanding dengan laju pertumbuhan produksi di sektor ini sebesar rata-rata 12 persen per tahun.

Sementara itu perkembangan ekspor sejak awal tahun 1970-an menunjukkan pergeseran besar dalam susunan komposisinya. Diantara ekspor non-migas, ekspor industri manufacturing menunjukkan kenaikan yang paling pesat. Pada tahun 1980 ekspor industri manufacturing baru 21 persen dari nilai ekspor non migas, di tahun 1984 sudah meningkat menjadi 66 persen. Kemudian selama triwulan pertama tahun 1985 sudah mencapai 72 persen.

Perkembangan di atas sebenarnya memberi petunjuk masih adanya peluang dan harapan bagi ekspor komoditi industri di tengah situasi kelesuan ekonomi dalam negeri maupun di bidang internasional. Sikap proteksionisme oleh pihak negara-negara industri nampaknya bisa diterobos dengan penggalakan ekspor barang industri manufaktur.

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI

Perhatian terhadap usaha pembangunan industri di daerah, baru populer sesudah PD II yang dipelopori oleh Perroux (1970), Myrdal (1957), dan Hirschman (1958). Teori Perroux yang dikenal dengan istilah **pusat pertumbuhan** (*pole of growth*) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut *pusat pertumbuhan* dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri pemimpin (*L'industrie motrice*) yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri pemimpin tersebut.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri pemimpin) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Pada hakekatnya Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah adalah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri tersebut mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu yaitu keuntungan skala ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya.

Keuntungan skala ekonomis ini dapat dibagi menjadi:

1. *Keuntungan internal perusahaan*
Keuntungan ini timbul karena ada faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau dipakai dalam jumlah yang lebih banyak, biaya produksi per unit akan lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit.
2. *Keuntungan lokalisasi (localization economies)*
Keuntungan ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. Artinya dengan menumpuknya industri, maka setiap industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang lain.
3. *Keuntungan eksteren (keuntungan urbanisasi)*
Artinya, aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat jadi manajer. Di samping itu aglomerasi tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, misalnya: listrik, air minum, perbankan dalam skala yang lebih besar. Oleh karena dibangun dalam skala yang besar, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.

Disamping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. Penumpukan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, industri-industri tidak perlu menyediakan atau mengusahakan jasa angkutan sendiri. Padahal penyediaan jasa pengangkutan sendiri biayanya sangat mahal.

Bagi NSB, supaya pembangunan tidak hanya menumpuk pada suatu daerah, maka perlu campur tangan pemerintah terutama untuk membantu perkembangan daerah-daerah yang sulit berkembang. Campur tangan pemerintah tersebut dapat dilakukan baik dengan cara mencegah aglomerasi pada daerah tertentu maupun mendorong timbulnya pusat pertumbuhan pada daerah tertentu, dengan berbagai tindakan sebagai berikut:

1. *Kebijaksanaan Negatif*
Kebijaksanaan negatif masuknya membatasi perkembangan industri di daerah-daerah yang sudah maju, dengan tujuan disamping mengatasi kepadatan juga untuk menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ke daerah yang kurang berkembang. Teknik yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempersulit atau membatasi pemberian izin pendirian industri di daerah-daerah maju, di pihak lain mempermudah pemberian izin pendirian industri di daerah yang kurang maju. Kebijakan ini di atas paling mudah dilakukan sebab tidak membutuhkan dana dalam pelaksanaannya. Hanya saja dalam penerapan kebijakan ini harus hati-hati, sebab kalau terlalu ketat, dapat memperlambat atau menghambat pembangunan di masa yang akan datang.
2. *Pemberian Perangsang Fiskal*
Perangsang fiskal ini yang antara lain adalah:

- a. Pembebasan pajak (tax holidays), caranya adalah dengan pembebasan pajak pendapatan selama beberapa tahun sejak industri didirikan, sehingga dapat mempertinggi laba yang diperoleh.
- b. Pembebasan pajak dan cukai impor terhadap impor barang-barang modal, alat pengganti dan bahan mentah yang diperlukan industri. Kebijakan jenis ini sangat baik dilakukan terutama oleh negara-negara yang mengenakan pajak dan cukai yang tinggi. Kebijakan seperti ini akan menekan ongkos produksi industri yang bersangkutan, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan industri sejenis dalam menentukan harga penjualan.
- c. Mempercepat depresiasi atau penyusutan, yaitu dengan cara mempertinggi penyusutan tiap-tiap tahun, dengan maksud mempercepat kembalinya modal yang ditanamkan. Kebijakan jenis ini akan memperbesar laba riil yang diperoleh setiap tahun, sebab bagian dari pendapatan yang sebenarnya merupakan laba dipakai atau dianggap sebagai penyusutan, sehingga memperkecil pajak pendapatan yang harus dibayar industri kepada pemerintah.
- d. Perangsang keuangan. Di NSB sering kali dijumpai orang-orang yang mempunyai jiwa wiraswasta, namun karena kemampuan, terutama kemampuan finansial yang tidak memadai, jiwa wiraswasta tersebut sulit dimanifestasikan. Untuk menyalurkan kemampuan mereka ini pemerintah dapat melakukannya dengan cara memberikan perangsang-perangsang keuangan, agar mereka mau mendirikan industri di daerah-daerah yang diinginkan pemerintah, dalam bentuk: (i) memberikan secara cuma-cuma sebagian modal yang dibutuhkan yang disebut sebagai hibah (grant) dan (ii) dapat juga dengan memberikan pinjaman dengan syarat lunak, baik dalam bentuk tingkat bunga yang rendah atau masa pelunasan yang cukup panjang.

Kriteria yang digunakan dalam memberikan perangsang fiskal dan keuangan adalah sesuai dengan kemampuan suatu daerah. Artinya, semakin menarik suatu daerah sebagai lokasi industri maka semakin besar perangsang yang harus diberikan. Daya tarik suatu daerah untuk menjadi pusat pertumbuhan dipengaruhi:

- a. Keadaan prasarana, sebab keadaan prasarana menentukan efisiensi industri. Selama belum tersedia prasarana yang memadai dalam suatu daerah, sangat sulit diharapkan berkembangnya industri di daerah yang bersangkutan.
- b. Keadaan pasar. Dalam hubungan industri dengan keadaan pasar, maka industri dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:
 1. *Industri yang dekat dengan bahan baku* (resources oriented industry), yaitu terutama yang memproses bahan pertanian dan bahan makanan. Dalam hal ini menarik tidaknya suatu daerah ditentukan oleh tersedianya bahan mentah yang dibutuhkan industri di daerah tersebut.
 2. *Industri yang dekat dengan pasar produksi* (market oriented industry) yang terdiri dari industri bahan makanan yang tidak tahan lama dan industri jasa-jasa.

-
3. *Industri yang letaknya netral terhadap pasar maupun terhadap bahan mentah* (foot-loose industry) umumnya terdiri dari industri pengolahan di mana efisiensinya tidak tergantung pada berbagai fasilitas yang terdapat di daerah tersebut seperti kebebasan bergerak dan sebagainya.

3. *Perangsang Institusional*

Perangsang jenis ini berhubungan dengan industri ekonomi, keuangan dan administrasi pemerintah. Biasanya daerah-daerah di NSB cara kerjanya kurang baik. Selama industri-industri ini kerjanya kurang baik, akan menjadi faktor penghambat untuk penanaman modal ke daerah yang bersangkutan. Salah satu syarat utama yang perlu diperhatikan adalah mengadakan perombakan sistem administrasi yang ada. Administrasi pemerintah yang kurang efisien seperti prosedur yang terlalu berbelit-belit, proses kerja yang lambat, sangat besar akibatnya terhadap industriawan dalam menanamkan modal di daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan keterangan di atas, mengingat keadaan daerah di NSB belum maju, di pihak lain pemerintah ingin menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan. Timbul pertanyaan bagaimana cara pemerintah untuk mengalokasikan dana yang jumlahnya relatif sedikit tersebut supaya dapat diperoleh hasil maksimum. Apakah dana itu dialokasikan merata ke seluruh daerah atau diberikan kepada daerah tertentu saja. Mengingat tujuan pembangunan daerah adalah untuk membangun daerah tersebut dalam rangka memaksimalkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, maka cara terbaik untuk alokasi dana pembangunan daerah adalah dengan memusatkan dana-dana tersebut ke daerah-daerah yang secara potensial maupun riil mempunyai kemungkinan untuk berkembang lebih cepat. Sebab dengan cara demikian, disamping menjamin efisiensi penggunaan modal yang jumlahnya terbatas, juga dapat memungkinkan semua daerah yang memperoleh giliran untuk menjadi pusat pertumbuhan. Penentuan suatu daerah tertentu sebagai pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sangat bermanfaat, sebab dengan cara ini diperoleh keuntungan tertentu, yaitu:

1. Menghemat pengeluaran pemerintah dalam membangun prasarana-prasarana yang dibutuhkan oleh industri serta mempertinggi efisiensi penggunaan prasarana yang disediakan pemerintah, sebab biaya pemeliharaannya kalau dipusatkan akan lebih rendah. Di samping itu penggunaan prasarana akan dapat mencapai tingkat optimal, sebab dapat menghindarkan terjadinya kelebihan kapasitas prasarana yang didirikan pemerintah.
2. Memungkinkan terjadi eksternalitas ekonomi bagi industri, yaitu:
 - a. Kawasan industri mempererat hubungan antar industri, sehingga mempermudah memperoleh bahan mentah yang diperlukan serta tersedianya pasar untuk hasil produksinya.
 - b. Tersedianya tenaga yang dibutuhkan dengan kemampuan yang lebih baik yang datang dari daerah-daerah lain, sehingga kalau industri ingin mencari atau mengganti tenaga, dengan tenaga yang lebih baik, dapat segera dilakukan tanpa mengganggu proses produksinya.

-
- c. Tidak perlu mendirikan atau mengusahakan kegiatan-kegiatan tertentu yang walaupun ada kaitannya dengan kestabilan usaha, seperti usaha perbengkelan, rumah sakit, tempat rekreasi, sekolah-sekolah dan sebagainya, akibat modal yang dimiliki dapat dialokasikan seluruhnya untuk investasi atau mendirikan industri yang diinginkan.

Menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi penyebab suatu daerah mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Menjawab pertanyaan ini telah dikemukakan dua teori yaitu:

1. **Teori Export Base** (North, 1964)

Teori ini mengatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan daerah, karena sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang penting kepada perekonomian daerah yaitu:

- a. ekspor akan secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah.
- b. perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan terhadap produksi industri lokal (*residential industries*) yaitu industri yang produknya dipakai untuk melayani pasar di daerah.

2. **Teori Resources Base** (Perloff & Wingo, 1964)

Teori ini merupakan perluasan teori *export base*, sebab teori ini juga mengatakan bahwa perkembangan sektor ekspor di suatu daerah peranannya besar sekali dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun antara kedua teori ini ada perbedaannya yaitu:

- a. Data yang dipakai dalam teori *resources base* jauh lebih lengkap dibandingkan dengan data yang digunakan dalam teori *export base*.
- b. Teori *resources base*, analisisnya lebih mendalam serta memberikan penekanan pada:
 1. pentingnya peranan kekayaan alam suatu daerah dalam pembangunan daerah yang bersangkutan.
 2. faktor-faktor yang mempengaruhi efek pengganda dari sektor ekspor kepada seluruh perekonomian daerah.

KETERKAITAN ANTAR INDUSTRI

Pendapat-pendapat yang mendukung investasi dalam bidang industri sebagai suatu prioritas pembangunan bukan hanya didasarkan kepada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri menyertai pembangunan. Para penganjur industri yang pertama kali menunjukkan bahwa industri merupakan suatu sektor pemimpin (*leading sector*) karena industri tersebut merangsang dan mendorong investasi-investasi di sektor-sektor lain juga. Pola perkembangan industri, dimana diikuti oleh barang-barang yang diproduksi untuk industri-industri, menunjukkan bahwa keterkaitan (*linkages*) di dalam industri sendiri maupun dengan sektor lainnya, perlu untuk dikembangkan.

Konsep pertumbuhan tidak seimbang dari Albert Hirschman yang dibahas dalam Bab 6 menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong

perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut. Keterkaitan-keterkaitan (linkages) ini bisa *keterkaitan kebelakang* (backward linkages) jika pertumbuhan tersebut, misalnya, industri tekstil menyebabkan dalam produksi kapas atau zat-zat pewarna untuk disediakan bagi industri tekstil tersebut. Keterkaitan tersebut bisa juga *keterkaitan ke depan* (forward linkages) yaitu jika adanya industri tekstil domestik tersebut mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi misalnya.

Ada beberapa percobaan untuk mengukur keterkaitan dari Hirschman ini. Di antara berbagai formula yang digunakan untuk mengukur keterkaitan tersebut, yang paling mudah untuk dimengerti dan digunakan untuk berbagai tujuan, adalah yang dikemukakan oleh *Pan Yotopoulos* dan *Jeffrey Nugent* (1973). Formula keterkaitan ini tergantung pada tabel input-output yang dibentuk untuk menggambarkan ke belakang secara langsung dari suatu industri, *J*, diukur sebagai:

$$L_{bj} = \frac{\sum_i X_{ij}}{X_j} = \sum_i a_{ij}$$

dimana:

L_{bj} adalah indeks keterkaitan ke belakang,

X_j adalah nilai dari produk ke-*j*,

X_{ij} adalah nilai input (jasa) "i" yang disediakan dari dalam negeri untuk memproduksi produk "j" (kolom pada tabel input-output memproduksi produk "j" (kolom pada tabel input-output), dan

a_{ij} adalah koefisien input-output Leontief.

Dari formulasi di atas ditunjukkan bahwa ukuran dari keterkaitan ke belakang untuk setiap industri hanya merupakan penjumlahan dari koefisien input dalam negerinya. Jika, misalnya, nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh industri tekstil sebesar 30 persen dari nilai outputnya dan nilai input yang diimpor sebesar 15 persen dari nilai outputnya, maka keterkaitan ke belakang dari industri tekstil tersebut, L_{b3} adalah 55 persen ($100 - 30 - 15 = 55$). Semakin tinggi nilai tambah (value added) dan semakin banyak input yang berasal dari impor, maka semakin rendah indeks keterkaitan tersebut dan semakin kecil peranan industri tersebut dalam mendorong pembangunan dari industri-industri penyedia bagi industri tersebut.

Yang diungkapkan di muka adalah indeks untuk keterkaitan langsung. Tetapi jika produksi tekstil mendorong pertumbuhan produksi kapas, bisakah produksi kapas tersebut mendorong produksi pupuk? Hal yang mudah untuk menggabungkan pengaruh-pengaruh tidak langsung ini ke dalam indeks keterkaitan ke belakang secara keseluruhan. Analog dengan persamaan di muka (keterkaitan ke belakang), jumlahkan koefisien-koefisien *invers* Leontief yang ditandakan oleh r_{ij} , maka :

$$L_{ij} = \sum_i r_{ij}$$

dimana: - L_{ij} adalah indeks keterkaitan ke belakang secara langsung ditambah tak langsung (keseluruhan) dari industri ke-j.

Untuk mengukur keterkaitan ke depan secara langsung digunakan formula:

$$L_{fi} = \frac{\sum_j X_{ij}}{Z_i}$$

dimana:

L_{fi} adalah indeks keterkaitan ke depan untuk industri ke-i,

X_{ij} adalah output industri ke-i yang dibeli oleh setiap pemakai industri ke-j (baris dari tabel input-output), dan

Z_i adalah jumlah produksi barang i sebagai input antara maupun untuk penggunaan akhir.

Yotopoulos dan Nugent menggunakan tabel input-output dari 5 NSB (Chili, Yunani, Mexico, Spanyol, dan Korea Selatan) untuk mengukur indeks keterkaitan dari 18 jenis industri. Hasil-hasilnya ditunjukkan oleh Tabel 13.1 di bawah ini.

Pada Tabel 13.1 tersebut tampak pada kolom kedua dari yang terakhir bahwa, misalnya, untuk setiap tambahan US \$ 1 barang kulit dihasilkan, maka produksi semua inputnya harus meningkat sebesar US \$ 2,39.

Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa perluasan industri tersebut akan mendorong produksi sektor-sektor lainnya dalam perekonomian tersebut. Oleh karena itu suatu strategi pertumbuhan tidak seimbang seyogyanya dimulai dengan industri-industri yang mempunyai indeks keterkaitan ke belakang secara keseluruhan yang tinggi.

Industri pengolahan mendominasi rangking teratas dari Tabel 13.1, baik ditinjau dari keterkaitan ke belakang secara langsung atau keterkaitan ke belakang secara keseluruhan. Industri-industri dasar (primary), utilities, dan jasa-jasa, adalah rendah untuk kedua keterkaitan tersebut. Oleh karena itu suatu strategi pertumbuhan tidak seimbang seyogyanya ditekankan pertama kali kepada industri pengolahan, terutama sekali barang-barang konsumsi dan sesudah itu industri kimia dan produk-produk logam.

INDUSTRI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

Setelah melihat industri dari berbagai perspektif di bagian muka, kita bisa mencapai kesepakatan akan peranan yang diharapkan dari industri terhadap pembangunan. Pertama, industrialisasi bukanlah suatu "obat yang paling mujarab" (a panacea) untuk mengobati keterbelakangan. Tidak ada satupun faktor produksi, atau kebijaksanaan, atau sektor, atau penekanan yang bisa menyelesaikan secara sendiri-sendiri perubahan-perubahan yang rumit yang kita sebut "pembangunan". Demikian pula halnya dengan industri. Tetapi industri ini

Tabel 13.1
Indeks dan Peringkat Keterkaitan Sektoral pada 5 NSB

Indeks ke Sektor	Rang-depan langsung (L_f)	Indek ke king	belakang total (L_b)	Rang king	Indeks total (L_t)	Rang king
– Kulit	0,645	4	0,683	2	2,39	1
– Logam Dasar	0,980	1	0,632	5	2,36	2
– Pakaian	0,025	18	0,621	6	2,32	3
– Produksi makanan dan minuman	0,272	16	0,718	1	2,22	5
– Kertas	0,778	3	0,648	3	2,17	6
– Kimia dan penyulingan minyak	0,599	7	0,637	4	2,13	7
– Produksi Logam dan Mesin	0,430	13	0,558	9	2,12	8
– Kayu dan Mebel	0,582	9	0,620	8	2,07	9
– Konstruksi	0,093	17	0,543	10	2,04	10
– Percetakan	0,508	10	0,509	12	1,98	11
– Industri pengolahan lainnya	0,362	15	0,505	13	1,94	12
– Karet	0,453	12	0,481	14	1,93	13
– Mineral	0,870	2	0,517	11	1,83	14
– Pertanian	0,502	11	0,368	15	1,59	15
– Utilities	0,614 6	0,296	16	1,49	16	
– Pertambangan	0,638 5	0,228	17	1,47	17	
– Jasa-jasa	0,378	14	0,255	18	1,41	18

Sumber: Yotopoulos, P. & Nugent, J., *Economics of Development: Empirical Investigation*, Harper & Row, 1976.

mempunyai 2 pengaruh yang penting dalam setiap program pembangunan. Pertama, seperti dibahas dalam model dua sektornya Lewis, produktivitas yang lebih besar dalam industri merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kedua, industri pengolahan (manufacturing) memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar bagi ISI yang efisien dan meningkatkan ekspor daripada kemungkinan dari industri primer saja.

Jika industrialisasi bukan merupakan obat yang mujarab bagi keterbelakangan, demikian juga halnya pembangunan pedesaan. Masing-masing membutuhkan yang lainnya, dan akan gagal jika pertumbuhan tidak seimbang serta terlalu jauh. Industri bisa menyediakan input-

input produktif, terutama pupuk dan peralatan pertanian yang sederhana, bagi pertanian. Jika kebijaksanaan luar negeri dijalankan dan industri pengolahan telah efisien, input-input tersebut bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada harga impor. Hubungan tersebut bisa kebalikannya, karena pertanian menyediakan bahan-bahan baku untuk industri, misalnya kapas, karet, atau tembakau. Pertanian dan industri juga saling menyediakan pasar bagi barang-barang produksinya masing-masing. Jika pendapatan sektor pertanian tersebut tumbuh secara merata, dimana dibutuhkan land-reform dan pembangunan pedesaan yang sangat meluas, maka industri akan menikmati pasar yang lebih luas bagi barang-barang konsumsinya. Sejalan dengan itu, pertumbuhan pendapatan di perkotaan yang didorong oleh perluasan industri, akan mendorong pertumbuhan output pertanian dan produktivitas melalui kenaikan permintaan akan pangan. Namun demikian, kunci dari permintaan akan pangan tersebut adalah tingkat pengerjaan yang meningkat dan perbaikan distribusi pendapatan di perkotaan.

Disini kita menjumpai dua mata rantai yang lemah dalam rangkaian tersebut. Industri (secara sendiri) tidak bisa menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang memadai untuk menyerap pertumbuhan jumlah tenaga kerja atau pemerataan distribusi pendapatan, terutama di NSB. Perekonomian yang liberalistis, dengan pengendalian yang sedikit dan harga-harga tergantung pada nilai kelangkaan, bisa membantu untuk mencegah kecenderungan menuju penggunaan modal yang lebih banyak dan teknologi modern dalam industri pengolahan, yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja di sektor industri. Penekanan baru terhadap industri kecil mungkin bisa membantu. Lebih dari itu, memperluas teknologi menengah dan teknologi inovatif diperlukan untuk menghemat modal dan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Tetapi dalam analisis akhir beban dalam menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan juga terletak pada sektor-sektor lain diluar industri, misalnya pertanian dan jasa.

Industri telah dipandang sebagai suatu kunci untuk mencapai tujuan lainnya di NSB. Jika suatu negara menginginkan untuk memproduksi sendiri barang-barang kebutuhan pokoknya, maka negara tersebut harus membangun suatu struktur industri yang terpadu dan sektor pertanian yang produktif. Jika negara itu ingin untuk menutup politik luar negeri dan pengaruh budaya, maka negara tersebut harus belajar untuk menjalankan pabrik-pabriknya tanpa bantuan luar negeri. Banyak diskusi tentang pengurangan ketergantungan adalah tentang berkembangnya *autarky* atau *self-sufficiency*, yang menunjukkan bahwa suatu negara harus memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tetapi sebuah pilihan lain menunjukkan kemampuan untuk memproduksi berbagai macam barang secara efisien dan mampu untuk menjualnya ke pasar dunia, dan mendapatkan beberapa barang dari luar negeri jika hal itu menguntungkan untuk dilakukan.

Dibalik pertimbangan-pertimbangan tersebut, tersembunyi suatu tujuan pembangunan yang terpendam: industrialisasi untuk kepentingan industri itu sendiri. Meskipun saran dari berbagai arah untuk memperkeras kebijaksanaan proteksi dan kebijaksanaan industri lainnya dan bukan untuk meningkatkan efisiensi, tingkat pengerjaan, dan pemerataan, banyak pemerintah yang terus memantapkan industri-industri yang padat-model yang ada. Hal

tersebut tidak dapat dikaitkan dengan kebijaksanaan yang salah arah. Keinginan suatu negara untuk memiliki suatu industri yang modern mungkin sama besarnya dengan keinginan dari setiap individu akan radio atau mobil. Memperluas industri merupakan tujuan itu sendiri. Tindakan yang paling baik yang bisa dilakukan ekonom pembangunan adalah menjelaskan berapa banyak yang bisa dikerjakan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pilihan dan menghitung biaya industrialisasi tersebut dipandang dari tujuan-tujuan lainnya yang akan dicapai.

INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

Pembangunan industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam mencapai sasaran Pembangunan Jangka Panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Macam Industri

Untuk mengetahui macam-macam industri ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Menurut DP, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu:

1. **Industri Dasar** yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD antara lain: industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya.
Ditinjau dari “misi”nya, Industri Dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar seajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.
2. **Industri Kecil** yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain), industri galian bukan logam), dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat - alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).
Kelompok Industri Kecil inimempunyai misi melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi menengah atau sederhana, dan padat karya. Pengembangan Industri Kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (ekspor).
3. **Industri Hilir** yaitu kelompok Aneka INdustri (AI) yang meliputi antara lain: industri yang mengolah sumberdaya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumberdaya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok AI ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas

kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau teknologi maju.

Kedua, pengelompokan industri menurut jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pengelompokan industri dengan cara ini dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Perusahaan/Industri Besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih.
2. Perusahaan/Industri Sedang jika mempekerjakan 20 sampai 99 orang.
3. Perusahaan/Industri Kecil jika mempekerjakan 5 sampai 19 orang.
4. Industri Kerajinan Rumah Tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan maka perusahaan-perusahaan industri besar yang paling menonjol, lihat Tabel 13.2 di bawah ini.

Tabel 13.2.
Tenaga Kerja dan Nilai Tanah pada Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil, dan Rumah Tangga, 1974/1975 dan 1979

Tahun	Tenaga Kerja (000)			Nilai Tambah Menurut Harga yg berlaku (milyar Rp)		
	Besar/ Sedang	Kecil	Rumah Tangga	Besar / Sedang	Kecil	Rumah Tangga
1974/1975	661,7 (13)	343,2 (7)	3.899,9 (80)	476,9 (78)	53,0 (9)	82,5 (13)
1979	870,0 (19)	827,0 (18)	2.794,8 (63)	1.660,4 (78)	187,3 (9)	291,4 (13)

Catatan: angka dalam () adalah persentase dari total.
Sumber: Statistik Indonesia, BPS, 1986.

Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan kedalam usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar.

Selain pengelompokan industri dengan dua macam di atas, industri bisa juga dibedakan menjadi industri substitusi impor dan industri promosi ekspor. Atau bisa juga dibedakan menjadi industri yang padat modal dan industri yang padat karya. Industri substitusi impor (ISI) dan industri promosi ekspor (IPE) tersebut dibahas pada bagian tersendiri.

Industri Substitusi Impor (ISI)

Salah satu strategi industrialisasi yang dilaksanakan Indonesia, sejak zaman pemerintahan ORBA adalah industri substitusi impor (ISI). ISI ini diharapkan bisa menghasilkan barang-barang baru di dalam negeri yang semula di impor. Setelah substitusi impor ini berhasil, baru kemudian sebagian hasil produknya diekspor. Jadi substitusi impor ini memegang peranan penting dalam mengenalkan barang-barang baru yang dulunya diimpor dan kemudian dihasilkan sendiri.

Alasan untuk mengadakan ISI ini sebenarnya berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain. Namun demikian, berikut ini dijelaskan beberapa alasan penting:

1. ISI ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Seperti diketahui, hampir semua NSB seringkali mengalami kekurangan devisa. Oleh karena itu, devisa yang sedikit dimiliki harus digunakan secara efektif dan efisien.
2. Dengan adanya ISI ini biasanya pemerintah melakukan proteksi terhadapnya dengan cara pembatasan barang-barang impor. Pembatasan barang-barang impor tersebut tentu saja akan mengurangi jumlah barang-barang impor, sementara itu permintaan di dalam negeri masih tetap besar, sehingga pada akhirnya para pengusaha dalam negeri terdorong untuk meningkatkan produksi barang-barang yang terkena pembatasan impor tersebut. Dengan kata lain, ISI ini bisa merangsang kegiatan ekonomi para pengusaha di dalam negeri.
3. ISI ini bisa dimaksudkan untuk segera dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan berbagai barang industri dan juga karena semangat kemerdekaan yang timbul di NSB, yang kemudian diikuti pula oleh keinginan untuk mencapai kemerdekaan dalam bidang ekonomi.
4. Alasan lain bagi adanya ISI ini adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Walaupun suatu negara tidak mengalami kesulitan devisa, misalnya, tetapi untuk memajukan perekonomian dan mendorong timbulnya industri-industri utama di dalam negeri, negara tersebut melakukan proteksi dan memberikan berbagai macam fasilitas kepada para pengusaha. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh para pengusaha bisa meningkat dan dapat mendorong kegiatan ekonomi lebih lanjut.

Dari uraian di muka tampak ISI itu timbul karena alasan yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam kenyataan, alasan-alasan dari kebijaksanaan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam beberapa hal ISI itu merupakan tujuan dari kebijaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian, kebijaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya ditujukan untuk mengadakan substitusi impor semata. Masih banyak tujuan lain yang lebih luas sehingga untuk mencapainya diperlukan berbagai kebijaksanaan. Kebijakan substitusi impor itu hanya merupakan satu bagian saja dari berbagai macam kebijaksanaan yang ditempuh.

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan ISI ini ada berbagai masalah yang dihadapi oleh NSB yang melaksanakannya. Pertama, kualitas barang yang dihasilkan. Kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang substitusi impor sering jauh lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri. Kualitas barang yang rendah ini akan sulit untuk diekspor. Dengan demikian, ISI ini bukannya menghemat penggunaan devisa tetapi juga menurunkan penerimaan ekspor.

Kedua, biaya produksi. Pada tahap awal industrialisasi biasanya dibutuhkan biaya yang sangat besar yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja, membeli mesin-mesin, dan membeli bahan-bahan baku yang diperlukan. Jadi modal yang dibutuhkan sangat banyak. Oleh karena negara itu hanya memiliki modal yang sedikit, maka dalam tahap awal industrialisasinya terpaksa mendatangkan modal dan tenaga kerja dari luar negeri.

Mendatangkan modal dan tenaga kerja dari luar negeri tersebut tentu akan memperbesar biaya produksi sehingga melemahkan daya saing dari barang tersebut. Untuk menghadapi saingan dari barang-barang impor yang kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah, maka pemerintah perlu melakukan pembatasan impor dan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri tersebut. Misalnya, sejak tahun 1972 pemerintah Indonesia melarang impor mobil jadi (*built-up*) untuk mengembangkan industri perakitan mobil dan industri karoseri.

Usaha Indonesia, strategi ISI ini telah mengakibatkan masuknya teknologi secara besar-besaran ke Indonesia. Banyak teknologi tersebut yang menggeser teknologi-teknologi lama yang ada, sedang sisanya dimanfaatkan dalam proses produksi barang-barang baru. Kita bisa menyebutkan beberapa contoh teknologi baru yang menggeser teknologi yang lama yaitu misalnya, pabrik-pabrik tekstil terpadu (*integrated mills*) yang besar yang cenderung menggunakan lebih banyak barang-barang tenun sintesis, kenaikan yang dramatis dari jumlah sepeda motor dan dari jumlah kendaraan ringan (berukuran 1 - 1,5 ton) "colt", makin meluasnya barang-barang plastik. Contoh-contoh mengenai teknologi baru yang digunakan untuk memproduksi produk-produk baru bisa disebutkan antara lain: timbulnya industri-industri agrokimia dan banyak industri obat-obatan baru.

Namun demikian, studi yang telah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi antara lain ahli ekonomi dari Bank Dunia *Clive Gray* (1982) telah mengungkapkan bahwa berbagai industri perakitan yang telah dibangun di Indonesia selama satu-dua dasa warsa yang lalu, misalnya industri otomotif, ternyata tidak efisien dan menghasilkan "nilai tambah negatif" jika diukur dengan harga pasaran dunia. Meskipun produksi dalam negeri dari produk akhir menguntungkan para industrialis karena proteksi efektif atau *effective rate of protection* (proteksi atas nilai tambah domestik) yang tinggi sekali, namun nilai input-input (bahan-bahan baku dan komponen-komponen) pada harga pasaran dunia sering melebihi nilai produk akhir pada harga pasaran dunia. Dengan demikian, maka jumlah devisa yang perlu dikeluarkan untuk kegiatan substitusi impor tersebut lebih besar daripada jumlah devisa yang dapat dihemat dengan berkurangnya impor produk akhir dari luar negeri.

Industri Promosi Ekspor (IPE)

Oleh karena strategi substitusi impor, yang telah ditempuh Indonesia selama kurang lebih 20 tahun, kurang berhasil membangun struktur industri yang kokoh dengan daya saing internasional yang kuat maka strategi tersebut secara pelan-pelan bergeser ke strategi promosi ekspor, terutama untuk komoditi non-migas. Apalagi setelah kita dihadapkan pada kenyataan bahwa penerimaan devisa dari migas tidak selamanya dapat diharapkan, baik karena cadangan migas kita yang relatif terbatas maupun karena fluktuasi harga migas di pasar internasional yang sering kali tidak menentu.

Menurut *Anne Krueger* (1978), Wakil Presiden Bank Dunia, ada 4 faktor yang dapat menerangkan mengapa strategi industrialisasi promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat ketimbang strategi substitusi ekspor. Keempat faktor tersebut adalah (1) kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, (2) skala ekonomis (*economies of scale*), (3) dampak persaingan atas prestasi perusahaan, dan (4) dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi.

ad (1). Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri

Pengalaman beberapa NSB, antara lain India, RRC dan Filipina, telah menunjukkan bahwa suatu sektor pertanian yang pertumbuhannya lamban dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan sektor industri pada khususnya. Hal ini dapat terjadi karena produksi pertanian yang lamban akan meningkatkan harga pangan, sehingga tingkat upah juga cenderung naik, sehingga pada akhirnya akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri.

Pertumbuhan sektor pertanian yang pesat memang penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, namun pengalaman dari Korea Selatan (yang sejak tahun 1961 telah menempuh strategi industrialisasi promosi ekspor) telah menunjukkan bahwa dengan strategi promosi ekspor, kaitan antara keberhasilan sektor pertanian dan keberhasilan sektor industri tidak begitu erat seperti di bawah strategi substitusi impor. Hal ini disebabkan karena NSB yang telah menempuh strategi promosi ekspor ternyata lebih berhasil dalam memupuk cukup cadangan devisa untuk mengimpor pangan (jika perlu) daripada negara-negara yang telah menempuh strategi substitusi impor. Negara-negara terakhir ini sering mengalami kekurangan devisa, karena strategi substitusi impor ternyata justru mempunyai kepadatan impor yang tinggi. Dengan demikian maka biaya oportunitas impor pangan tinggi sekali, karena devisa yang langka ini tidak dapat digunakan untuk impor lainnya yang penting, misalnya barang-barang modal untuk pembangunan.

ad (2). Skala ekonomis

Bagi industri-industri di mana faktor skala ekonomi (*economies of scale*) adalah penting, maka strategi promosi ekspor akan dapat memberikan dorongan yang lebih kuat kepada perusahaan-perusahaan baru daripada di bawah strategi substitusi impor, karena perusahaan-perusahaan ini dapat menyusun rencana investasi, produksi dan pemasaran mereka atas dasar potensi pasar domestik dan pasar ekspor. Dengan strategi promosi ekspor sejak semula dapat dibangun pabrik dengan skala ekonomi yang efisien, oleh karena dalam membangun pabrik-

pabrik tersebut para industrialis sudah merencanakan untuk memasarkan sebagian dari produksi mereka di pasar dunia.

Sebaliknya, di bawah strategi substitusi impor rencana-rencana investasi, produksi dan pemasaran hanya didasarkan atas perkiraan mengenai potensi pasar domestik, khususnya tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dalam pasaran domestik yang menikmati proteksi kuat. Jika jumlah perusahaan domestik yang “memasuki” cabang industri tertentu dibatasi (*entry barrier*) oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan pemerintah untuk menghindari kelebihan kapasitas (*excess capacity*), maka perusahaan atau beberapa perusahaan yang memperoleh izin (*license*) usaha, akan dapat menikmati kedudukan monopolistik dalam pasar tersebut. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan harga jual barang-barang yang mereka hasilkan di atas tingkat harga penjualan barang-barang yang mereka hasilkan di atas tingkat harga yang akan berlaku jika seandainya terdapat persaingan sempurna dalam pasar tersebut, dan juga di atas tingkat harga internasional (harga yang berlaku di pasar dunia). Akan tetapi dalam konteks NSB di mana luasnya pasar domestik masih terbatas sekali karena daya beli terbatas dari masyarakat luas, maka kenaikan tingkat harga penjualan barang-barang akan lebih memperkecil lagi luasnya pasar domestik. Dengan demikian maka strategi industrialisasi promosi ekspor akan memberikan peluang yang lebih besar bagi berbagai industri manufaktur untuk mencapai skala ekonomi yang efisien daripada di bawah strategi substitusi impor.

ad (3). Persaingan

Suatu segi positif yang penting dari strategi promosi ekspor adalah bahwa persaingan di pasar ekspor mengharuskan para industrialis untuk menjajagi berbagai cara untuk menekan biaya produksi mereka sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga hasil-hasil produksi mereka dapat bersaing dalam hal harga (*price competitive*) di pasar ekspor. Di samping kemampuan bersaing dalam hal harga, maka persaingan ketat di pasar ekspor juga akan mengharuskan para industriawan untuk mengadakan pengendalian mutu (*quality control*) yang ketat pula, mengadakan modifikasi dalam disain barang-barang sesuai dengan perubahan selera masyarakat dan kemajuan teknologi baru, dan memastikan pengadaan barang-barang sesuai dengan jadwal pengadaan yang telah ditetapkan.

Persaingan ketat yang pada umumnya terdapat di pasar ekspor tidak dirasakan oleh industri-industri yang telah berkembang di bawah strategi substitusi impor. Dengan proteksi kuat di pasar domestik (yang memberikan perlindungan terhadap saingan impor), dan kadang-kadang dengan pembatasan jumlah perusahaan di suatu cabang industri tertentu, berdasarkan kekhawatiran akan timbulnya kelebihan kapasitas dan kelebihan investasi (*over investment*), yang mengurangi persaingan di pasar domestik, maka tidak mengherankan bahwa para industrialis kurang mempunyai insentif untuk menekan harga barang-barang mereka, mengendalikan mutu, menyesuaikan barang-barang mereka dengan selera masyarakat atau perubahan teknologi, dan menetapkan jadwal pengadaan yang tepat. Malahan dengan harga tinggi dan mutu yang kurang memadai, para industrialis dalam pasar domestik yang menikmati proteksi masih tetap akan dapat memperoleh laba yang cukup.

ad (4). Kekurangan devisa

Pengalaman NSB, termasuk Indonesia, telah menunjukkan bahwa kekurangan devisa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tingkat makro ekonomi, skala investasi nasional perlu dikurangi, jika diperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang akan dihadapi masalah kekurangan devisa. Pada tingkat mikro ekonomi, berbagai proyek pembangunan mungkin perlu dijadwalkan kembali (seperti dilakukan Indonesia pada tahun 1983 sebagai akibat dari defisit transaksi berjalan yang telah dialami sejak tahun 1982 dengan berakhirnya rezeki minyak dan demikian juga pada tahun 1991 sebagai akibat dari adanya *booming* investasi pasca deregulasi perbankan) atau terpaksa dihentikan jika impor bahan-bahan baku, barang-barang setengah jadi, dan barang-barang modal tidak dapat dilanjutkan akibat kekurangan devisa.

Meskipun NSB yang telah menempuh strategi promosi ekspor tentu tidak bebas dari masalah tekanan pada neraca pembayaran dan kekurangan devisa, namun strategi yang bertujuan untuk memperoleh devisa sebanyak mungkin melalui ekspor barang-barang jadi (manufactured exports) akan lebih berhasil dalam memupuk cadangan devisa yang memadai daripada strategi substitusi impor yang ternyata sering memperbesar kekurangan devisa bertalian dengan kepadatan impor yang tinggi dari berbagai industri substitusi impor.

Pola Pengembangan Industri

Di Indonesia sekarang ini seolah-olah terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah:

1. Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada yang dimiliki keunggulan komparatif (comparatif advantage). Pemikiran seperti ini boleh dikatakan diwakili oleh kalangan *ekonom-akademis*.
2. Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan Industri yang dikemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi, yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri- industri hulu secara serentak (simultan).
3. Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir. Konsep ini merupakan konsep Menteri Perindustrian.

Pengelompokan pola pikir industrialisasi di atas sebenarnya secara keseluruhan telah tercakup dalam *Pola Pengembangan Industri Nasional (PPIN)* yang dibuat oleh Departemen Perindustrian. PPIN tersebut berintikan 6 butir kebijaksanaan:

1. Pengembangan industri yang diarahkan untuk pendalaman dan pamtapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya.
2. Pengembangan industri permesinan dan elektronika penghasil barang modal.
3. Pengembangan industri kecil.
4. Pembangunan ekspor komoditi industri.
5. Pembangunan Kemampuan Penelitian, Pengembangan dan Rancang Bangun Khususnya Perangkat Lunak dan Perekayasaan.

6. Pembangunan kemampuan para wiraswasta dan tenaga kerja industrial berupa manajemen, keahlian, kejujuran serta ketrampilan.

Butir pertama, pengembangan industri sejauh mungkin diarahkan kepada pedalaman struktur industri, dimana pelaksanaannya dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan sumberdaya kelautan. Selain itu, juga dikaitkan dengan kalayakan ekonomi yang memperhatikan skala ekonomi, pilihan teknologi dan kemantapan pasar bagi dalam negeri maupun luar negeri. Dalam bukti pertama ini dikembangkan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD), Industri Logam Dasar (ILD), dan Aneka Industri (AI). IKD dan ILD mengolah sumberdaya alam sebagai bahan baku, sedangkan AI mengolah hasil industri dasar dan sumberdaya alam yang tidak diolah oleh industri dasar.

Pengembangan IKD tersebut mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan melalui penguatan struktur industri, meningkatkan ekspor, meningkatkan kemampuan teknologi, dan mengembangkan tenaga ahli dan trampil. Sedangkan arah pengembangan kelompok IKD ini adalah untuk menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi untuk pasaran dalam dan luar negeri, meningkatkan keterkaitan, menjadi penggerak utama pembangunan wilayah melalui pembangunan Zona Industri Kimia, dan meningkatkan kemampuan perangkat lunak, Penelitian, Pengembangan, Rancang Bangun dan Teknologi serta mengembangkan keahlian dan ketrampilan industri.

Adapun cabang dan jenis IKD yang dikembangkan adalah meliputi industri selulosa dan karet (pengolahan kayu dan karet alam), industri agrokimia (pengolahan gas alam untuk pupuk, industri pestisida), industri organik (pengolahan gas alam dan nafta, pengolahan hasil-hasil limbah pertanian pengolahan batubara), dan industri anorganik (industri semen, industri gas industri, pengolahan mineral, industri silikat untuk kaca, bata tahan api, dan lain-lain).

Sementara itu pengembangan kelompok ILD mempunyai misi untuk menyediakan logam dasar berupa besi dan baja, aluminium, tembaga, dan lain-lain yang diperlukan oleh industri mesin. Melalui pengembangan ILD ini diharapkan kebutuhan dalam negeri akan logam dasar yang bernilai strategis bisa dipenuhi, prinsip keterkaitan bisa meningkat, dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan wilayah melalui zona industri logam dasar, dan bisa meningkatkan teknologi, rancang bangun, dan perekayasaan.

Sedangkan pengembangan kelompok AI bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan dengan cara: meningkatkan keterkaitan, meningkatkan penggunaan bahan baku dan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kelompok AI ini merupakan pengolah lebih lanjut hasil-hasil industri dasar dan sumberdaya alam lainnya yang tidak diolah oleh industri dasar. Dalam rangka pendalaman dan pematapan struktur maka dalam Repelita V diprioritaskan untuk mengembangkan industri yang mengolah sumberdaya pertanian dalam arti luas, industri yang mengolah sumberdaya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah

lebih lanjut produk industri dasar, dan industri yang memanfaatkan sumberdaya manusia untuk menunjang pendidikan dan kesehatan.

Butir Kedua adalah pengembangan industri permesinan dan elektronika. Arah pengembangan kedua industri ini ditujukan pada penanganan komoditi industri yang mempunyai pasar yang jelas, berulang dan meningkat. Untuk itu, pendekatannya diatur dengan pembuatan produk melalui lisensi, pembuatan melalui tahap perakitan (*assembling*) dan kemudian dilanjutkan pembuatan (*manufacturing*). Dalam tahap awal, mutlak perlu dilaksanakan kebijaksanaan tata niaga, baik melalui proteksi tarif maupun pengaturan tata niaga yang bersifat sementara.

Industri mesin dan elektronika yang dikembangkan meliputi mesin perkakas, mesin pertanian, alat-alat berat, mesin alat listrik, elektronika, kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, kapal dan mesin peralatan lepas pantai, dan mesin peralatan pabrik. Untuk menjamin pengadaan bahan baku logam industri besi baja, aluminium, dan tembaga dikembangkan pula.

Kemampuan rancang bangun dan perekayasaan diarahkan terutama untuk pembuatan mesin-mesin dan peralatan pabrik bagi pembangunan industri/pabrik yang mengolah hasil pertanian dan hasil pertambangan, seperti pabrik gula, pabrik minyak nabati, pabrik semen, pabrik pupuk dan industri petrobased lainnya, serta industri-industri lain. Sementara itu untuk menguasai teknologi dan keteknikan dilakukan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya tercapai pengembangan industri permesinan dan elektronika dengan mantap.

Butir Ketiga adalah pengembangan industri kecil yang tangguh. Pengembangan industri kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dengan pengembangan industri kecil ini pula maka partisipasi masyarakat dapat meluas sehingga masyarakat akan siap secara politis, sosial, dan mental untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam proses industrialisasi.

Langkah pokok yang perlu dilakukan untuk mengembangkan industri kecil adalah pemecahan masalah pemasaran, terutama melalui program keterkaitan. Sedangkan para pengrajin di sentra diarahkan untuk memanfaatkan wadah Koperasi sebagai sarana usaha. Disamping itu diperlukan peningkatan kewiraswastaan, bantuan teknik yang ditujukan kepada peningkatan mutu serta bantuan permodalan.

Pembinaan industri kecil ini pada dasarnya dilakukan melalui pembinaan sentra-sentra industri kecil dengan bantuan unit pelayanan teknis. Pada tahun 1985 telah dibentuk 1.562 sentra industri kecil meliputi cabang industri seperti pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, kerajinan umum serta cabang industri logam. Pada umumnya masalah yang dihadapi industri kecil menyangkut soal manajemen, modal dan mutu, disamping soal pemasaran. Salah satu pemecahannya adalah melalui keterkaitan dengan perusahaan besar, baik industri maupun perdagangan.

Sementara itu bantuan unit pelayanan teknis meliputi antara lain: pengolahan dan analisis data, desain dan rekayasa produk tertentu, penerapan teknologi modern, bantuan

peralatan/mesin produksi, pembinaan manajemen, dan pembinaan serta latihan tenaga kerja industrial.

Butir Keempat adalah pengembangan industri untuk ekspor, Tujuan peningkatan ekspor hasil industri ini adalah untuk meningkatkan penerimaan devisa. Untuk mengembangkan ekspor komoditi industri ini dilakukan dengan usaha:

1. Mendorong industri yang berorientasi ekspor atau yang memilih daya saing /keunggulan komparatif yang mantap untuk ekspor.
2. Mengembangkan industri yang semula bergerak dalam substitusi impor menjadi industri ekspor.

Berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia yang kita miliki, maka industri yang harus dikembangkan ekspornya antara lain: industri yang memproses sumberdaya alam hasil pertanian, industri yang memproses sumberdaya alam hasil hutan, industri yang memanfaatkan hasil pertambangan migas dan non-migas, dan industri yang menggunakan sumberdaya manusia dalam bentuk teknologi canggih dan menengah maupun yang berdasarkan seni budaya dan ketrampilan tradisional yang umumnya bersifat padat karya.

Butir Kelima adalah pengembangan kemampuan perangkat lunak yang meliputi peningkatan kemampuan Penelitian dan Pengembangan, Rancang-Bangun, dan Perakayasaan. Kebijakan ini perlu didukung oleh kebijakan fiskal, khususnya aspek dana APBN, kredit perbankan, sedang pemanfaatan dana pinjaman luar negeri perlu diatur kasus demi kasus.

Pengembangan kemampuan ini merupakan keterpaduan berbagai kebijakan industrialisasi.

Langkah-langkah pokok tersebut adalah:

1. *Pengembangan industri yang berorientasi ekspor*
Dalam rangka meningkatkan ekspor hasil industri dan mendorong berkembangnya keanekaragaman ekspor hasil industri, langkah yang ditempuh adalah memacu pengembangan industri-industri yang berorientasi ekspor, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil, yang semakin banyak terdapat dan tersebar di seluruh daerah
2. *Pendalaman dan penguatan sektor industri*
Melanjutkan usaha pendalaman struktur industri, terutama cabang atau jenis industri yang telah teridentifikasi memiliki hubungan keterkaitan antar industri atau dengan sektor ekonomi lainnya yang cukup besar. Langkah ini ditujukan sebagai usaha untuk memperkokoh struktur industri dan mengurangi ketergantungan impor produk- produk hasil industri.
3. *Pengembangan industri kecil*
Meningkatkan pengembangan industri kecil dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan dan pemeratakan pendapatan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tertinggal.
4. *Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian*
Meningkatkan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian sebagai upaya

pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian dan sektor lainnya dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi nasional dan memperkokoh struktur ekonomi.

5. *Peningkatan penguasaan dan penyebaran teknologi*

Melaksanakan peningkatan dan pengembangan penguasaan dan penyebaran teknologi terapan di sektor industri, dalam rangka usaha merintis pengembangan hasil industri yang memiliki keunggulan komparatif dari segi teknologi dan ekonomi, serta meninjang usaha pendalaman struktur industri, peningkatan ekspor hasil industri dan pengembangan industri kecil.

6. *Pengembangan Langkah Penunjang*

Langkah lainnya yang bersifat menunjang langkah-langkah pembangunan industri meliputi antara lain pengembangan sistim informasi industri dan perencanaan pengembangan industri nasional, perencanaan tenaga kerja industrial, peningkatan pendidikan dan latihan keterampilan baik bagi tenaga kerja swasta maupun bagi pegawai Departemen teknis yang terkait, penyempurnaan prasarana dan sarana fisik pemerintah terutama di daerah, dan peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah dan pengawasan. Dalam hal ini akan dilaksanakan pula penyebaran informasi tentang dimensi perwilayahan dari perkembangan industrialisasi dalam bentuk perkembangan wilayah pusat pertumbuhan industri serta pengembangan kawasan industri.

Disamping itu dilakukan juga peningkatan pemyarakatan usaha penanganan serta pengendalian pencemaran limbah industri. Selanjutnya juga diupayakan peningkatan dan perluasan serta kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dalam berbagi bidang yang menyangkut upaya industrialisasi, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui balai-balai penelitian, BUMN dan lembaga pendidikan tinggi, maupun yang dilakukan oleh badan usaha swasta.

(2) *Program-program Pembangunan Industri Repelita V*

Pertumbuhan sektor industri, yang meliputi industri pengilangan minyak, industri gas alam cair dan industri pengolahan non-migas, selama Repelita V diperkirakan mencapai rata-rata 8,5 persen per tahun. Khusus industri pengolahan non-migas, pertumbuhannya selama periode tahun 1989/90 sampai dengan tahun 1993/94 diperkirakan mencapai rata-rata 10,0 persen per tahun. Dengan perkiraan laju pertumbuhan sektor industri tersebut diharapkan terjadi peningkatan kontribusi sektor industri di dalam ekonomi nasional pada tahun terakhir Repelita V. Bersamaan dengan itu pemantapan dan pengembangan keterkaitan pembangunan sektor industri dengan sektor-sektor lainnya, baik sektor-sektor ekonomi maupun non-ekonomi, dalam proses industrialisasi diharapkan akan lebih mendorong peningkatan laju pertumbuhan pembangunan yang optimal dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini informasi tentang dimensi perwilayahan dalam perkembangan industrialisasi dalam bentuk perkembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, perkembangan zona-zona industri dan kawasan industri, akan semakin disebarluaskan dan dimasyarakatkan.

Ekspor hasil industri dalam Repelita V diperkirakan kian menjadi salah satu sumber devisa yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Peranan ekspor hasil industri dalam keseluruhan ekspor diperkirakan akan meningkat dari 47,7 persen pada akhir Repelita IV menjadi 59,7 persen pada akhir Repelita V. Dalam penyediaan lapangan kerja, pelaksanaan pembangunan sektor industri selama repelita V diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja tambahan sekitar 2,3 juta orang atau sekitar 20 persen dari seluruh tambahan lapangan kerja yang diperkirakan terjadi dalam Repelita V. Dari perkiraan jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut, kelompok industri kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja kepada sekitar 1,6 juta orang.

Bertolak dari hasil-hasil yang telah dicapai serta memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi sektor industri pada akhir Repelita IV dan mengingat peranan pembangunan sektor industri yang diharapkan dalam Repelita V, maka berbagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri nasional tetap akan menjadi titik sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan sektor industri, seperti pengembangan industri dengan orientasi ekspor, pendalaman dan penguatan struktur industri, dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan restrukturisasi industri dan meningkatkan keterkaitan antar industri.
2. Menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui perbaikan sistem produksi, peningkatan kemampuan manajerial (profesional dan kewiraswastaan) dan penyempurnaan iklim usaha.
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Meningkatkan kemampuan teknologi manufaktur, teknologi produk dan peningkatan mutu, termasuk pula standardisasi dan normalisasi produk dan proses industri, serta pengembangan produk baru.
5. Menata organisasi industri dalam rangka memperluas kesempatan berusaha serta mengembangkan hubungan yang semakin erat dan sehat antara industri besar, industri menengah dan industri kecil.

Usaha-usaha tersebut dicakup dalam program-program pembangunan sektor industri yang dikelompokkan dalam 2 program yaitu *program umum pembangunan sektor industri* dan *program pembangunan kelompok-kelompok industri*.

1. *Program Umum Pembangunan Sektor Industri*

Program umum pembangunan industri terdiri dari program pengembangan industri berorientasi ekspor, program penguatan dan pendalaman struktur industri, program pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, dan program peningkatan penguasaan dan penyebaran teknologi industri dan program penunjang.

2. *Pembangunan Menurut Kelompok Industri*

Berdasarkan program umum serta kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan sektor industri seperti diuraikan di atas, maka program-program pokok pembangunan sektor industri selama Repelita V disusun berdasarkan kelompok Aneka Industri (AI),

kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar, kelompok Industri Kimia Dasar, dan Industri Kecil. Tujuan dan misi dari masing-masing kelompok industri ini sudah dijelaskan di muka.

KONSEP PENTING DALAM BAB INI

Sektor pemimpin (leading sector)
Keterkaitan ke belakang (backward linkages)
Keterkaitan ke depan (forward linkages)
Industri Substitusi Impor
Industri Promosi Ekspor
Industri Dasar
Industri Kecil
Industri Hilir
Resource oriented industry
Market oriented industry
Foot-loose industry
Resources based industry
Export base industry

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

Petunjuk:

Pilih satu jawaban yang benar di antara lima pilihan jawaban yang tersedia dengan cara melingkari huruf di muka jawaban yang Saudara anggap benar.

1. Yang dimaksud dengan industri yang mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (leading sector) adalah:
 - a. industri yang mampu memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lain
 - b. industri yang besar dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan nasional.
 - c. industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
 - d. industri yang akan merangsang pembukaan kawasan baru.
 - e. Tidak ada jawaban yang benar.
2. Apabila sektor industri bisa menyumbang 20-30 persen terhadap PDB, maka menurut UNIDO negara tersebut digolongkan:
 - a. Kelompok negara non-industri
 - b. Kelompok negara dalam proses industrialisasi
 - c. Kelompok negara semi industri
 - d. Kelompok negara industri
 - e. Kelompok negara industri baru
3. Berikut ini adalah ciri-ciri sektor pemimpin (leading sector) menurut Hirschman, *kecuali*:
 - a. Sektor tersebut memiliki keterkaitan ke depan tinggi

-
- b. Sektor tersebut memiliki keterkaitan ke belakang tinggi
 - c. Sektor tersebut dapat merangsang munculnya sektor-sektor lain yang menjadi pesaingnya.
 - d. Sektor tersebut dapat merangsang munculnya sektor-sektor lain yang menggunakannya sebagai input
 - e. sektor-sektor dapat menghasilkan produk yang menguasai konsumsi massa.
4. Sebuah model analisis yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian adalah :
 - a. *Error Correction Model*
 - b. Model Input-Output
 - c. Model Ekonometrik
 - d. Model Matrix
 - e. *Partial Adjustment Model*
 5. Manfaat yang sering di sebut sebagai keuntungan dari melakukan pembangunan industri adalah :
 - a. Kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan per kapita
 - b. Kemungkinan dapat mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri
 - c. Kemungkinan dapat meningkatkan ekspor
 - d. Tidak ada jawaban yang benar
 - e. Semua jawaban benar
 6. Yang termasuk dalam pengelompokan industri menurut Biro Pusat Statistik (BPS) adalah :
 - a. Industri Dasar
 - b. Industri Hulu
 - c. Industri Hilir
 - d. Industri Rumah Tangga
 - e. Semua jawaban benar
 7. Alasan untuk melakukan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI), antara lain, adalah :
 - a. Untuk menghemat penggunaan devisa
 - b. Untuk melakukan politik ekonomi “isolasi”
 - c. Untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif
 - d. Untuk dapat bersaing dengan negara yang sama-sama sedang membangun
 - e. Tidak ada jawaban yang benar
 8. Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak efisiennya industri otomotif di Indonesia, antara lain, adalah :
 - a. Terlalu kuatnya proteksi yang diberikan
 - b. Terlalu banyaknya merek, padahal segmentasi penawarannya sempit
 - c. Didominasinya sebagian besar lisensi oleh Jepang
 - d. semua jawaban di atas benar
 - e. Tidak ada jawaban yang benar.
 9. Berikut ini adalah beberapa alasan perlunya dikembangkan strategi industri promosi ekspor (IPE) menurut Anne Krueger (1978), *kecuali* :

-
- a. Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri
 - b. Terbukanya pasar dunia
 - c. Skala ekonomis
 - d. Dampak persaingan atas prestasi perusahaan
 - e. Dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi
10. Dari beberapa pernyataan berikut yang paling benar mengenai pembangunan industri di Indonesia adalah :
- a. Pertumbuhan sektor industri Indonesia adalah yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN selama dua dasawarsa terakhir ini
 - b. Struktur industri di Indonesia didominasi oleh barang-barang manufaktur
 - c. Pasar OECD telah dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia
 - d. Industri kita menyerap banyak sekali tenaga kerja dibandingkan dengan sektor pertanian
 - e. Industri kita sangat hemat dalam menggunakan devisa
11. Dalam hubungannya dengan keadaan pasar, maka industri yang dekat dengan bahan bakunya disebut:
- a. *resources base industry*
 - b. *resources oriented industry*
 - c. *market oriented industry*
 - d. *foot-loose industry*
 - e. *export base industry*
12. Dalam hubungannya dengan keadaan pasar, maka industri yang netral terhadap pasar maupun bahan bakunya disebut:
- a. *resources base industry*
 - b. *resources oriented industry*
 - c. *market oriented industry*
 - d. *foot-loose industry*
 - e. *export base industry*
13. Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan perangsang fiskal untuk mencegah terjadinya proses aglomerasi, *kecuali* :
- a. pembebasan pajak
 - b. mempercepat depresiasi
 - c. pembebasan pajak impor barang modal
 - d. memberikan perangsang keuangan
 - e. tidak ada jawaban yang benar

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU:

- Adelman, Irma, *Theories of Economic Growth and Development*, Stanford University Press, California, 1961.
- Ariff, Mohamed & Hall Hill, *Export-Oriented Industrialisation: The ASEAN Experience*, Allen & Unwin, Sydney, 1985.
- Arnon, I., *Modernization of Agriculture in Developing Countries: Resources, Potentials, dan Problems*, John Wiley & Son, 1981.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1982.
- Boeke, J.H., *Prekapitalisme di Asia*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Chenery, Hollis & Moses Syrquin, *Patterns of Development, 1950-1970*, Oxford University Press, 1975.
- Garnaut, R. & Peter McCawley (eds.), *Indonesia: Dualism, Growth, and Poverty*, ANU, Canberra, 1981.
- Garnaut, Ross & Christopher Findlay (ed.), *The Political Economy of Protection: Experiences of ASEAN and Australia*, Allen and Unwin, Sydney, 1986.
- Gillis, Malcolm (et.al), *Economics of Development*, second edition, W.W. Norton & Company, New York, 1987.
- Hardiman, M. & J. Midgley, *The Social Dimensions of Development*, John Wiley & Son, 1982.
- Hayami, Yujiro & Vernon Ruttan, *Agricultural Development: An International Perspective*, The Johns Hopkins Press, Baltimore and London, 1983.
- Higgins, Benyamin, *Economic Development: Problems, Principle, and Policies*, W.W. Norton & Company, New York, 1975.
- Hirschman, Albert O., *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press, 1958.
- Hymer, S., *The Multinational Corporations: A Radical Approach*, Cambridge University Press, 1979.
- Jenkins, Rhys, *Transnational Corporations and Uneven Development*, Mathuen & Co, New York, 1987.
- Kaplinsky, Raphael (ed.), *Third World Industrialisation in the 1980s: Open Economies in a Closing World*, Frank Cass & Co, London, 1984.
- Kincaid, J.C., *Poverty and Equality in Britain*, Penguin Books, Middlesex, 1975.
- Kindleberger, Charles P. & Bruce Herrick, *Economic Development*, McGraw-Hill, 1977.
- Kirkpatrick, C.H. (et.al), *Industrial Structure and Policy in Less Developed Countries*, Allen and Unwin, 1984.
- Meier, Gerald M. (ed.), *Leading Issues in Economic Development*, fifth edition, Oxford University Press, New York, 1989.
- Meier, Gerald M. & Baldwin, R.E., *Economic Development: Theory, History, and Policy*, John Wiley, 1960.
- Mellor, John W., *The Economics of Agricultural Development*, Cornell University Press, Ithaca, 1966.

-
- Miller, Herman P., *Rich Man, Poor Man*, Thomas Y. Crowell Co, 1971.
- Mosher, A.T. , *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, PT Yasaguna, Jakarta.
- Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Mukhopadaya, Swapna, *The Poor in Asia: Productivity-raising Programmes and Strategies*, Asian and Pacific Development Center, Kuala Lumpur, 1985.
- Myint, Hla, *The Economic of the Developing Countries*, Hutchinson, London, 1967.
- Poot, Huib (et.al), *Industrialization and Trade In Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, *Economics*, fifteenth edition, McGraw-Hill, 1990.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, cetakan II, Borta Gorat, Medan, 1981.
- Sundrum, R. M., *Income Distribution in Less Developed Countries*, Routledge, London, 1990.
- Thirwall, A. P., *Growth and Development*, The Macmillan Press Ltd, 1977.
- Todaro, Michael P., *Economic Development in the Third World*, Longman, 1977.
- Todaro, Michael P., *Development Planning*, Oxford University Press, 1983.
- Wie, Thee Kian, *Industrialisasi Indonesia: Analisis dan Catatan Kritis*, Penerbit Sinar Harapan, 1988.
- World Bank, *World Development Report 1990*, Oxford University Press, 1990.
- Yotopoulos, P. & Nugent, J., *Economics of Development: Empirical Investigation*, Harper & Row, 1976.

ARTIKEL-ARTIKEL:

- Arsyad, Lincoln (et.al), *Agribusiness in Indonesia: Facts, Problems, and Prospects*, Business News, March 10, 1986.
- Arsyad, Lincoln, *Transnational Corporations and Economic Globalisation*, Business News, November 28, 1990.
- Arsyad, Lincoln. *Structures and Performances of Industries in ASEAN Countries*, Business News, May 22, 1991.
- Arsyad, Lincoln, *Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia: Suatu Pengantar*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No. 1 Tahun VII 1992.
- Arsyad, Lincoln, *Sistem Kredit Pedesaan dan Kredit Usaha Kecil di Indonesia*, Jurnal MBA Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI), Vol. 1 No. 4, Agustus-September 1992.
- Soelistyo (dkk), *Prospek Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan dalam Repelita III*, Prisma, Januari 1979.
- Thee Kian Wie, *Pendekatan Dependencia dalam Sejarah Perekonomian: Suatu Kritik*, dalam Hendra Esmara (ed.), *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Killick, Tony, *The Possibilities of Development Planning*, Journal of Political Economy, 1974.

Speare, Alden, *Education, Earnings, and Migration in Indonesia*, Economic Development & Cultural Change, January 1986.

Elkan, Walter, *Policy for Small-scale Industry: A Critique*, Background paper for World Development Report 1987, 1987.

Dan lain-lain.

JAWABAN SOAL LATIHAN

JAWABAN BAB 1

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. E | 6. A | 11. B |
| 2. A | 7. A | 12. C |
| 3. D | 8. D | 13. E |
| 4. E | 9. D | |
| 5. E | 10. B | |

JAWABAN BAB 2

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. E | 5. E | 9. A |
| 2. B | 6. B | 10. A |
| 3. E | 7. C | |
| 4. A | 8. B | |

JAWABAN BAB 3

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. D | 6. B | 11. B |
| 2. A | 7. C | 12. E |
| 3. D | 8. A | 13. E |
| 4. E | 9. B | 14. E |
| 5. C | 10. D | 15. A |

JAWABAN BAB 4

- | | | |
|------|------|------|
| 1. E | 4. A | 7. E |
| 2. A | 5. A | 8. D |
| 3. E | 6. D | 9. D |

JAWABAN BAB 5

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. E | 5. E | 9. C |
| 2. E | 6. C | 10. E |
| 3. C | 7. D | |
| 4. B | 8. A | |

JAWABAN BAB 6

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. C | 5. E | 9. D |
| 2. C | 6. B | 10. A |
| 3. C | 7. D | |
| 4. C | 8. E | |

JAWABAN BAB 7

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. B | 5. E | 9. A |
| 2. E | 6. D | 10. B |
| 3. B | 7. D | |
| 4. B | 8. C | |

JAWABAN BAB 8

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. E | 6. E | 11. C |
| 2. C | 7. A | 12. A |
| 3. E | 8. A | 13. B |
| 4. A | 9. C | 14. B |
| 5. D | 10. E | 15. C |

JAWABAN BAB 9

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. C | 5. B | 9. A |
| 2. A | 6. C | 10. A |
| 3. E | 7. C | |
| 4. E | 8. E | |

JAWABAN BAB 10

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. A | 5. B | 9. |
| 2. A | 6. A | 10. A |
| 3. B | 7. E | |
| 4. C | 8. D | |

JAWABAN BAB 11

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. D | 6. E | 11. B |
| 2. D | 7. A | 12. C |
| 3. E | 8. A | |
| 4. E | 9. E | |
| 5. A | 10. B | |

JAWABAN BAB 12

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. E | 6. C | 11. C |
| 2. C | 7. C | 12. B |
| 3. A | 8. E | |
| 4. E | 9. E | |
| 5. E | 10. B | |

JAWABAN BAB 13

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. A | 6. D | 11. A |
| 2. B | 7. A | 12. C |
| 3. E | 8. D | 13. E |
| 4. B | 9. B | |
| 5. E | 10. D | |